Jurnal Agregasi

Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi

Volume 7 / Nomor 1 / Tahun 2019 / Hal. 1 - 110

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANDUNG BARAT *CA'ANG* BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT
Albert Januar Christian, dkk

ANALISIS *POLICY NETWORKS*: UTILITAS DAN LIMITASI
Auradian Marta dan Leo Agustino

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA CIMAHI
Fajri Miftahuddin, dkk

MENALAR DILEMA AKTOR DAN MODEL KERJASAMA DALAM KERJASAMA PEMERINTAH-SWASTA
Hanantyo Sri Nugroho

INOVASI PEMERINTAH DESA DLINGO DALAM MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA MART TAHUN 2017
Indah Putri Rengganis dan Muhammad Eko Atmojo

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DI DESA SAYANG KABUPATEN SUMEDANG
Indra Gunawan Wibiksana

PRODI ILMU PEMERINTAHAN
FISIP UNIKOM

p-ISSN : 2337-5299
e-ISSN : 2579-3047

JURNAL AGREGASI: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi
Merupakan Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan dua kali setahun pada Bulan Mei dan Nopember oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom. Jurnal Agregasi memuat berbagai hasil penelitian, konsep atau gagasan pemikiran yang terkait dengan reformasi pemerintahan.

KETUA EDITOR
Dewi Kurniasih, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom
(Scopus ID: 57199685060, Orcid ID: 0000-0002-4921-2093, Google Scholar , Sinta ID: 259139)

ANGGOTA
1. Nia Karniawati, Universitas Komputer Indonesia (Google Scholar, Sinta ID: 259065)
2. Nuning Kurniasih, Universitas Padjadjaran, Indonesia (Scopus ID: 57200989264, Google Scholar)
3. Ahmad Harakan, Unismuh Makassar, Indonesia (Google Scholar, Sinta ID: 186789)
4. Rino Adibowo, Universitas Komputer Indonesia (Google Scholar, Sinta ID: 6035483)
5. Tatik Rohmawati, Universitas Komputer Indonesia (Google Scholar, Sinta ID: 258739)
6. Tatik Fidowaty, Universitas Komputer Indonesia (Google Scholar, Sinta ID: 6098702)
7. Arif Zainudin, UPS, Tegal (Scopus ID: 345232017450, Google Scholar)

SEKRETARIS EDITOR
Lala Lasmawati, Universitas Komputer Indonesia

ALAMAT REDAKSI
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom
Jl. Dipati Ukur 112-114 Bandung 40132
Telp. 022.2533676 Fax. 022.2506577

OJS : http://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi
Web : http://jurnalagregasi.ip.unikom.ac.id
Email : jurnalagregasi@email.unikom.ac.id

Reviewer

1. Achmad Nurmandi (Scopus ID: 35731998300, Google Scholar), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
2. Kittisak Jermsittiparsert (Scopus ID: 55541914700, Google Scholar) Social Research Institute, Chulalongkorn University, Thailand
3. Halimah Abdul Manaf (Scopus ID: 55565189500, Google Scholar), Universiti Utara Malaysia
4. Caroline Paskarina (Scopus ID: 57203370098, Google Scholar), Universitas Padjadjaran, Indonesia
5. Poni Sukaesih Kurniati (Scopus ID: 57204176027, Google Scholar), Universitas Komputer Indonesia
6. Melly Maulin P (Scopus ID: 57193851449, Google Scholar), Universitas Komputer Indonesia
7. Cecep Darmawan (Scopus ID: 56976350500, Google Scholar), Universitas Pendidikan Indonesia
8. Abdul Hamid (Scopus ID: 56441004700, Google Scholar), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat *Illahi Robbi*, atas berkah dan rahmat-Nya, Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Volume 7 Nomor 1 Tahun 2019 yang dikelola Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom dapat kami terbitkan. Jurnal ini berisi karya ilmiah dari para dosen, peneliti, pakar, praktisi dan mahasiswa khususnya di bidang pemerintahan.

Jurnal Agregasi Volume 7 Nomor 1 Tahun 2019 ini memuat enam naskah. Naskah tersebut telah melalui *double blind review*. Mulai terbitan kali ini, kami sudah menerapkan full OJS (*Open Journal System*). Setiap naskah telah melalui *similarity check* menggunakan Turnitin.

Kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontibusi memberikan naskah ilmiahnya kepada kami. Besar harapan kami, Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi ini dapat Terakreditasi Nasional dan memberikan banyak manfaat kepada kita semua.

Bandung, Mei 2019

Tim Redaksi

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANDUNG BARAT *CA'ANG* BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Albert Januar Christian, dkk	1 – 24
ANALISIS *POLICY NETWORKS*: UTILITAS DAN LIMITASI Auradian Marta dan Leo Agustino	25- 41
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA CIMAHI Fajri Miftahuddin, dkk	42 – 60
MENALAR DILEMA AKTOR DAN MODEL KERJASAMA DALAM KERJASAMA PEMERINTAH-SWASTA Hanantyo Sri Nugroho	61 – 78
INOVASI PEMERINTAH DESA DLINGO DALAM MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA MART TAHUN 2017 Indah Putri Rengganis dan Muhammad Eko Atmojo	79 – 90
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DI DESA SAYANG KABUPATEN SUMEDANG Indra Gunawan Wibiksana	91 – 110

JURNAL AGREGASI

Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi
Volume 7– Nomor 1, Mei 2019

DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1697
Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN E-GOVERNMENT PADA DESA SAYANG KABUPATEN SUMEDANG

Indra Gunawan Wibiksana [1)] *, Desti Lestary [2)]* Ahmad Ulul Azmi [3)]*,
Dicky Setiawan Nugroho [4)]*, Hayatul insan [5)]*

[1-5] Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Komputer Indonesia. Jalan Dipatiukur No. 102-116, Kota Bandung, Jawa Barat, 40132, Indonesia.

Abstrak

Pelaksanaan e-Government di desa sayang dengan berpedoman terhadap instruksi presiden nomor 3 Penerapan Kebijakan e-Government dalam Peningkatan Mutu masih pada tahap penyiapan sarana akses seperti koneksi wifi yang masih terbatas, serta kurangnya sosialisasi situs informasi kepada masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan desktiptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan.. Adapun yang menjadi indikator atas nilai-nilai dasar dalam menentukan sukses dan tidaknya penerapan yang akan dan harus dicapai dalam penyelenggaraan e-Government ada 4 yaitu efektifitas, efisiensi, transfaransi dan akuntabilitas. Penerapan kebijakan e-Government di Desa Sayang masih belum optimal dalam penggunaan teknologi komunikasi dan informasi. Pemerintahan Desa sayang belum efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemerintahan berbasis E-Government.

Kata kunci: Implementasi, Implementasi Kebijakan, *e-Government*

Abstract

Implementation of e-Government in the village dear by referring to presidential instruction number 3 Implementation of e-Government Policy in Quality Improvement is still at the stage of preparing access facilities such as a limited wifi connection, as well as a lack of socialization of information sites to the public. The research method used by researchers is a qualitative research method with a desktiptif approach. Data collection techniques are carried out by means of literature studies and field studies. As for the indicators of basic values in determining the success and failure of applications that will and must be achieved in implementing e-Government there are 4 namely effectiveness, efficiency, transparency and accountability. The application of e-Government policies in Sayang Village is still not optimal in the use of communication and information technology. The Village Government unfortunately has not been effective, efficient, transparent and accountable in implementing E-Government-based governance.

Keywords: *Implementation, policy implementation, e-Government*

JURNAL AGREGASI
Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi
Volume 7– Nomor 1, Mei 2019
DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1697
Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu terus berubah seiring dengan berkembangnya zaman, hal ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dan bernegara seperti halnya pada kehidupan bernegara di Indonesia. Sejak adanya gerakan reformasi tahun 1998, paradigma yang berkembang dalam pemerintahan Indonesia adalah tuntutan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya dan terdapatnya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan hal tersebut, maka timbulah istilah *Clean and Good Governance* di Indonesia. Guna mewujudkan *Clean and Good Governance* terutama dari segi akuntabilitas dan transparansi publik, maka dibutuhkan suatu langkah kebijakan yang terarah dalam perubahan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan melalui pemanfaatan ICT yaitu *e-government* atau Pemerintahan Elektronik. Susartono (2006) dalam penelitiannya yang berjudul egovernment di Indonesia, menyimpulkan bahwa penyelenggaraan *e-government* bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi diterapkan dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan agar publik dapat mengetahui dan mengawasi kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan *good governance*. Salah satu bentuk dari penyelenggaran pemerintahan dengan penggunaan suatu sistem manajemen yang berbasis teknologi, yang populer disebut dengan *e-Government*.

E-government secara umum dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan penyampaian layanan (Forman, 2005). Istilah *e-government* atau *electronic government* merujuk pada penggunaan teknologi informasi oleh organisasi pemerintahan agar organisasi tersebut menjadi lebih efektif dan transparan. Dengan *e-government* diharapkan pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih baik, efektivitas internal organisasi pemerintahan semakin meningkat dan akses masyarakat terhadap informasi dalam lingkungan pemerintahan semakin mudah (Kase, 2010).

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang *good governance* dan *clean governance* khususnya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu diterapkan suatu sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu pelayanan publik. Tanggung jawab pelayanan terhadap berbagai kebutuhan masyarakat diletakan di tangan pemerintah. Fungsi pelayanan jasa publik, jasa pasar, serta pelayanan sipil dan fungsi pemberdayaan masyarakat menjadi tugas utama pemerintah. Dengan demikian, hanya melalui fungsi

DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1697
Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi

pelayanan dan pemberdayaan masayarakat, pemerintah mendapatkan kepercayaan dan legitimasi dari rakyat sedangkan rakyat sendiri akan hidup sejahtera dalam suatu hubungan kerakyatan dan pemerintahan yang bertanggung jawab (Priyanti, 2017).

e-Government merupakan bentuk penerapan pelayanan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dengan berbasis teknologi dan komunikasi demi menjawab tuntutan dan kebutuhan publik yang menginginkan proses pengolahan data yang cepat dan informasi yang tepat. *e-Government* diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan maksud agar tumbuh peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap citra pelayanan pemerintah khususnya birokrasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 bahwa mengingat kemajuan teknologi dan informasi sangat berkembang pesat dengan kemudahan-kemudahan yang akan bermanfaat dalam bidang-bidanng pemerintahan. Dengan meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan tranparansi yang akan dubangun untuk lebih menambah kemudahan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat ("www.hukumonline.com," 2004) serta bermula dari manfaat-manfaat kemudahan yang disuguhkan E-Government sebagai contoh pada bidang komunikasi dan sistem administrasi yang berubah secara drastis yakni yang biasanya pengurusan administrasi berjalan dalam hitungan jam bahkan hitungan hari menjadi lebih efisien dalam kecepatan pelayanan. Selain itu, semua yang bersangkutan dengan pemerintahan bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat-masyarakat luas dengan demikian bisa menumbuhkan rasa percaya masyarakat pada pemerintahan dan meminimalisir terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Edwi, 2008).

E-Government mulai diperkenalkan dalam institusi publik menjelang akhir abad 20 persisnya pada dekade akhir 1990-an. Teknologi informasi berkembang di Indonesia namun pengimplementasiannya di instansi – instansi pemerintahan dimulai sejak dikeluarkannya kebijakan pada tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No. 6 tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat**.**

proses demokrasi. Selanjutnya dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government yang merupakan bukti nyata pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui *e-Government*.

Penerapan *e-Government* pada pemerintahan saat ini belum berjalan mulus dibanding pihak swasta. Penggunaan sistem informasi masih

JURNAL AGREGASI
Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi
Volume 7– Nomor 1, Mei 2019
DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1697
Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi

belum maksimal. Masing-masing lembaga pemerintah baik pusat dan daerah belum memiliki hubungan kerjasama yang sinergis. Penerapan *e-Government* di Kabupaten Sumedang dapat menciptakan suatu hasil kerja yang efisien, partisipatif, berkeadilan, demokratis, transparan dan bertanggung jawab bila ditunjang dengan sistem aparatur negara yang modern, yang dilandasi oleh derajat rasionalitas yang tinggi. Pemerintah Kabupaten Sumedang menyadari bahwa *e-Government* penting dalam reformasi birokrasi dewasa ini. Harapan yang muncul adalah penerapan *e-government* akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, untuk penerapannya memang tidak mudah, karena memerlukan proses dan tahapan-tahapan seperti halnya meningkatkan hasil kerja birokrasi.

Peran E-Government sebagai Reduktor KKN E-government secara logis dapat berperan sebagai reduktor KKN. Mengapa? *Pertama*, implementasi e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti dalam Pelayanan Publik, Kebijakan Publik, akan semakin meminimalisir kontak langsung antar pelaku sehingga diasumsikan terjadinya penyimpangan dapat dikurangi. *Kedua*, dengan implementasi egovernment akan semakin tercipta transparansi dimana setiap pihak dapat mengetahui data atau informasi penting yang dibutuhkan *stakeholders*. Tingkat manipulasi data dapat lebih mudah dilacak untuk mengetahui data yang sebenarnya. Sebagai contoh: perpanjangan STNK/SIM lewat internet dengan tipe transaction akan semakin mudah dilakukan oleh pengguna/*user* karena dalam kanal akses Samsat perpanjangan SIM dan STNK terdapat informasi yang jelas dan transparan sehingga akan menutup kemungkinan peran calo di dalamnya. Dari beberapa uraian di atas dengan implementasi egovernment, performance organisasi publik akan semakin efisien, efektif, transparan, akuntabel, kreatif, dan partisipatif.

Road to E-Government

Bagaimana sebenarnya model pemerintahan lama berevolusi menjadi sebuah e-government? Ada sebuah teori yang cukup menarik untuk disimak dari seorang praktisi pemerintahan di Kanada. Secara umum, evolusi terjadi melalui empat tahapan besar, yaitu (Canada, GTIS): 1) *Knowledge Society*: *Human capital, innovation, standard of living, investment capital, trade, health, security*; 2) *Infrastructure: Network centric, speed to market, process less, electronic service, electronic commerce enabled, secure, trusted, reliable and interoperable;* 3) *Enabling Policy: Citizen engagement, connect ivy, inclusion of all Canadians, horizontal infrastructure, learning organization;* 4) *E-Government: Client centric, accessible, affordable, cross jurisdictional, transparent, renewable*.

Pertumbuhan *Knowledge Society* Secara alami, pemicu utama terbentuknya e-government bergantung pada seberapa cepat tumbuhnya *Knowledge Society* (KS) di dalam sebuah negara. *Knowledge society* adalah sebuah

JURNAL AGREGASI
Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi
Volume 7– Nomor 1, Mei 2019
DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1697
Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi

komunitas yang memiliki ciri-ciri utama antara lain sebagai berikut: 1) Menyadari bahwa aset terbesar komunitas terletak pada kompetensi, keahlian, dan pengetahuan (*intelligence*) dari masing-masing anggotanya (SDM), bukan terletak pada sumber daya lainnya semacam kekayaan finansial, relasi dengan industri, maupun hal-hal sejenis lainnya; 2) Memahami bahwa pengetahuan merupakan hasil metabolisme berbagai peneliti yaitu data/informasi, pengalaman, *content*, dan *context*; sehingga sehariharinya mereka akan "haus" untuk mengkonsumsi hal-hal tersebut; 3) Melakukan inovasi-inovasi baru dari hari ke hari baik yang bersifat *tangible* maupun *intangible*, karena adanya kesadaran bahwa satu-satunya cara untuk dapat bertahan dan menang dalam era global adalah dengan berusaha menjadi produsen yang baik (menciptakan berbagai produk dan jasa dengan kualitas prima; dan 4) Memiliki standar kehidupan yang relatif telah baik, dalam arti kata masyarakat tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, yaitu sandang, pangan, dan papan; sehingga prioritas aktivitas sehari-harinya saat ini adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara memperbaiki aspekaspek semacam keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Karena kebutuhan hidup sebagaimana layaknya seorang manusia telah dapat tercukupi.

Tujuan pengembangan *e-government* di Indonesia menurut Inpres No.3 Tahun 2003 adalah:

a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat, tanpa dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau.
b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional
c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara
d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Wajah pelayanan publik saat ini sudah lebih baik. Akhir-akhir ini upaya pengembangan e-government sedang giatgiatnya dilakukan kalangan birokrasi publik. Kecenderungan birokrasi publik seperti kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten menerapkan e-government

JURNAL AGREGASI
Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi
Volume 7– Nomor 1, Mei 2019
DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1697
Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi

dalam sistem tata pemerintahan patut diperhatikan dan menarik untuk dikaji. Berkaitan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka isu yang menarik adalah bagaimana tugas-tugas yang telah diserahkan pusat ke daerah dapat berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan tugas dengan baik khususnya pada sektor pelayanan, e-government nampaknya bisa dijadikan alternatif. Pembentukan Kantor Pengelolaan Data Elektronik (PDE) atau Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mempercepat proses penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Pelayanan publik yang sebaik-baiknya adalah pelayanan yang diproses cepat, tepat dan memberikan hasil akurat serta terpercaya dengan pertanggung jawaban penuh dan dengan ini pelayanan publik telah daitur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah dalam pemenuhannya. Landasan yuridis tentang kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan ini kepada masyarakat adalah hak sosial dasar yang dimiliki oleh seluruh masyarakat di Indonesia, dengan atau tanpa diskriminasi atau perbedaan di kehidupan sehati-hari maupun di muka hukum yakni Pasal 18A Ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, diterapkan kepada pemerintah Indonesia electronic government atau pemerintahan dengan pengelolan yang berbasis elektronik. Dalam hal ini pemerintah semakin dituntut untuk beralih dari pemerintah tradisional yang identik dengan paper based administration atau pemerintah yang berbasis dengan kertas atau segala sesuatu tugas diselesaikan dengan cara manual, hingga berubah menjadi electronic government administration atau pendigitalan dan segala bidang urusan dan pekerjaan dalam sektor pemerintahan yang di kenal dengan E-Government agar mempermudah pemberian pelayanan kepada masyarakat (Holle, 2011).

Keberadaan *e-Government* telah sampai ke seluruh daerah di Indonesia khususnya Provinsi Jawa Barat tepatnya di Kabupaten Sumedang. Penyediaan informasi pemerintah Kabupaten Sumedang melalui internet masih belum ditunjang oleh sistem manajemen yang efektif karena kurangnya dukungan terutama berupa persamaan persepsi oleh setiap instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedang tentang pentingnya penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi, serta kurangnya kesiapan dan keterbatasan sumber daya manusia dalam komputerisasi.

Implementasi penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan/*electronic government* di Indonesia masih hanya sebatas hubungan antara institusi dalam pemerintah. Jika ada pelayanan kepada masyarakat hanya sebatas tipe pelayanan *one-way service*, itu saja data-data yang ditampilkan jarang

JURNAL AGREGASI
Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi
Volume 7– Nomor 1, Mei 2019
DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1697
Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi

dimutakhirkan. Contoh implementasi *electronic government* di Indonesia misalnya: program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Program ini merupakan kerjasama Depdagri dengan pemerintah daerah dalam pelayanan data kependudukan yang terintegrasi langsung dengan pemerintah pusat/Depdagri. Jadi jika kita memasukkan data kependudukan di daerah otomatis akan ter-record langsung di data kependudukan pusat. Kelebihan dari sistem ini tentu saja meningkatkan efisiensi, data dapat dikirim secara cepat, meminimalisasi manipulasi data kependudukan dan lain-lain. Mengapa demikian? Dengan sistem ini dapat dicegah dobel KTP dengan mekanisme yang dibuat sedemikian rupa oleh sistem komputer. Selain mempunyai beberapa kelebihan implementasi SIAK (untuk saat ini) masih mempunyai kelemahan yang perlu dibenahi untuk masa mendatang yaitu sistem backup data dan database-nya masih berada di pemerintah pusat/Depdagri. Dengan demikian secara tidak langsung pelayanan di daerah sangat bergantung pada kondisi kanal akses, dalam hal ini Telkom dan kondisi di Depdagri. Bahkan ada pendapat ini merupakan wujud sentralisme. Sejauh ini program SIAK hanya diimplementasikan di beberapa daerah. Di Jawa Tengah baru dikembangkan di Kabupaten Pekalongan, Surakarta, Pemalang, dan Pati. Daerah-daerah tersebut mempunyai inisiatif sendiri untuk mengimplementasikan SIAK setelah mengetahui program dari Depdagri. Ini merupakan indikator kurangnya political will dari manajemen puncak di suatu daerah untuk mengimplementasikan electronic government. Sebenarnya SIAK akan lebih efektif jika digunakan serentak di seluruh Indonesia karena data yang akan terakumulasi secara serentak pula yang nantinya akan dipakai oleh institusi pemerintah untuk perencanaan pembangunan maupun penentuan kebijakan publik.

Penerapan *e-Government* di kantor desa selama ini penerapannya masih belum terlaksana dengan maksimal, kurangnya fasilitas yang mendukung dan perangkat desa yang masih belum mengerti dengan baik tentang teknologi menjadi kendala yang utama.

Realisasi pengembangan e-government di Indonesia menghadapi banyak tantangan baik dalam hal geografi, ekonomi, teknologi, politik, maupun budaya. Dalam proses implementasi, ditemukan beberapa fenomena yang menunjukkan implementasi e-government masih berjalan lambat dan tidak signifikan dengan besarnya biaya yang dikeluarkan Negara. Kesenjangan antar daerah, dan adanya duplikasi database menjadikan data produk pemerintah cenderung kurang dipercaya. Sosiawan (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Tantangan dan hambatan dalam implementasi e-government di Indonesia, menyimpulkan bahwa implementasi egovernment di Indonesia masih setengah jalan, sehingga

JURNAL AGREGASI
Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi
Volume 7– Nomor 1, Mei 2019
DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1697
Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi

diperlukan penyempurnaan konsep dan strategi pelaksanaan e-government.

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara tidak hanya terbatas hubungannya dengan rakyatnya, akan tetapi juga menyangkut kiprahnya di dunia internasional. Dengan berlangsungnya "*global village*" ini gelombang pemikiran tentang demokratisasi, hak asasi manusia, good government, good governance, dan good corporate governance telah menjadi isu-isu yang patut diperhatikan dan membutuhkan penanganan yang lebih baik. Jika dahulu pemerintah terkenal dengan birokrasinya yang sangat boros, lamban, kaku, dan tidak efisien, maka masyarakat saat ini membutuhkan sebuah kinerja pemerintah yang cepat, murah, dan berorientasi pada proses agar dapat memberikan dukungan yang signifikan dan kompetitif bagi para konsumernya (individu, komunitas bisnis, masyarakat, dan stakeholders yang lain) (Indrajit, 2000: X). Pada dasarnya tugas umum pemerintah adalah melayani masyarakat yang di dalamnya berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyebaran data maupun informasi yang penting bagi masyarakat. Dalam konteks ini, Teknologi Informasi (IT) akan sangat berperan didalamnya.

Penggunaan IT dalam penyelenggaraan pemerintah sering kita sebut e-gov (electronic government).

Sosialisasi penggunaan e-Government yang paling baik dan efektif adalah dari mulut ke mulut, dalam arti kata adalah bahwa pengalaman sukses seseorang berinteraksi melalui pemerintah dengan fasilitas teknologi informasi merupakan hal yang sangat berharga. Konsep e-Government tidak hanya berarti adanya perubahan kinerja yang baik dari kalangan pemerintah kepada rakyatnya, namun lebih jauh berarti adanya transformasi pendekatan penyelenggaraan sebuah pemerintahan dari yang berpusat pada pemerintah (eksekutif) menuju kepada yang berpusat pada masyarakat (demokrasi).

Jenis-jenis Pelayanan pada e-government Ada tiga jenis proyek-proyek pelayanan pada e-government :

Pertama adalah *one-way service*, pelayanan jenis ini adalah bentuk pelayanan dimana terjadi komunikasi satu arah. Pemerintah menyajikan sesuatu informasi dan data yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat yang membutuhkan. Media yang digunakan biasanya internet dengan situs-situs informasional. Misalnya, informasi Kota Semarang secara umum, informasi suatu institusi atau departemen, syarat-syarat pendirian badan usaha, data statistik dari BPS, hasil tabulasi suara Pemilu dari KPU, dan lain-lain.

Kedua, *two-way service*. Model pelayanan ini sedikit berbeda dengan publish. Model pelayanan *two-way service* bersifat komunikasi dua arah. Aplikasi model ini biasanya menggunakan bentuk portal yaitu ada fasilitas *searching* untuk pencarian data/informasi yang bersifat lebih spesifik (dalam model *one-way service*

JURNAL AGREGASI
Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi
Volume 7– Nomor 1, Mei 2019
DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1697
Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi

hanya berbentuk *link*). Aplikasi lain dari *two-way service* adalah pemerintah menyediakan fasilitas dimana masyarakat dapat berinteraksi baik secara langsung (*chatting*, *teleconference*, web-TV, dan lain-lain) ataupun tidak langsung melalui email, *frequently ask question*, *newsletter*, *mailing list* dan sebagainya. Contohnya: masyarakat dapat mengakses berapa jumlah pegawai dalam suatu institusi, berapa formasi yang kosong dan masih banyak yang lain (Pratama, 2005).

Di sini masyarakat dapat berdiskusi dengan anggota dewan legislatif melalui mailing list/email. Pelaku bisnis dapat berdiskusi tentang proyek-proyek pemerintah meliputi syarat, prosedur, dan sebagainya. Ketiga adalah transaction. Model ini hampir sama dengan model two-way service, akan tetapi transaction berhubungan dengan perpindahan uang antar pihak. Masyarakat tidak secara gratis mendapatkan layanan, tetapi harus membayar jasa pelayanan yang diberikan. Implementasi nyatanya dapat kita lihat dalam: 1) Masyarakat dapat mengajukan permohonan dan perpanjangan seperti: SIM, STNK, KTP lewat internet; 2) Masyarakat dapat membayar pajak dan retribusi kepada pemerintah lewat internet; 3) Praktek-praktek e-procurement dalam tender proyek-proyek pemerintah; 4) Petani dapat mempromosikan hasil panennya melalui internet, dan lain-lain. Dari ketiga model layanan tersebut, model ketiga nampaknya belum dapat dipraktikkan di Indonesia karena model ini lebih rumit, complicated, dan sophisticated dibanding model 1, 2, dan faktorfaktor tertentu yang menyebabkan model ketiga merupakan tantangan *e-government.*

Pada titik inilah teknologi yang diciptakan untuk mempermudah dan memperbaiki kualitas kehidupan manusia menunjukkan peranannya. Pada dasarnya mayoritas bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyediaan berbagai data, informasi, pengetahuan maupun kebijakan beserta penyebarannya ke seluruh anggota masyarakat yang membutuhkan, maka teknologi yang paling cocok untuk diterapkan adalah teknologi informas

Dari hasil observasi peneliti menemukan bahwa pelaksanaan e-government di desa sayang dengan berpedoman terhadap instruksi presiden nomor 3 Penerapan Kebijakan e-Government dalam Peningkatan Mutu menurut Diah Rachma A (Indrajit, Richardus Eko, 2004) tahun 2003 masih pada tahap persiapan hal ini ditandai dengan belum adanya situs website, penyiapan sarana akses seperti koneksi wifi yang masih terbatas, serta kurangnya sosialisasi situs informasi kepada masyarakat. Hasil observasi berikutnya diketahui bahwa masih belum optimalnya pelaksanaan e-government di kantor desa sayang hal ini disebabkan karna kurangnya fungsi kontrol dan pembinaan dari stakeholder terkait, kurangnya komitmen pelaksana

JURNAL AGREGASI
Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi
Volume 7– Nomor 1, Mei 2019
DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1697
Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi

dalam menjalankan kebijakan, masih minimnya otoritas desa oleh pusat dalam pengelolaan data. Hal ini berakibat pada ketersediaan sumber daya alat dan properti IT yang masih belum mencukupi. Dan lemahnya tingkat koneksi jaringan sebagai akibat terbatasnya anggaran dana pelaksanaan egovernment serta masih adanya beberapa masalah dalam disposisi pelaksana yang mempunyai implikasi pada ketersediaan sumber daya pendukung dalam pelaksanaan kebijakan *e-Government.*

METODE

Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan desktiptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang nyata.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 9 mei 2019.

Lokasi penelitian ini di Desa Sayang Jl. Kolonel Ahmad Syam No 226, Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Kode Pos 45363.

Target/Subjek Penelitian

Teknik penentuan informan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive.* Teknik ini ditunjukan dengan peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan yaitu ditunjukan perangkat desa yang bertanggungjawab secara struktural organisasi dalam pelaksanaan e-Government. Mereka yang dipilih pun harus dianggap kredibel untuk menjawab dan memberikan gambaran mengenai masalah yang sedang dibahas.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perangkat desa yang menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Desa. Alasan peneliti memilih kepala desa karena beliau bertanggung jawab menyelenggarakan pelaksanaan *e-Government* di Desa Sayang
2. Kepala Seksi Pelayanan. Alasan peneliti memilih kepala seksi karena yang melaksanakan pelayanan yang menerapkan *e-Government* dalam pelaksanaannya.

Prosedur

Penelitian deskritif kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan

JURNAL AGREGASI
Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi
Volume 7– Nomor 1, Mei 2019
DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1697
Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi

menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi, sikap, serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada dan pengaruhnya terhadap suatu kondisi. Penelitian dilakukan dengan cara observasi kelapangan dan mewawancarai pihak-pihak yang dianggap penting dalam penelitian ini.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan faktor penentu keberhasilan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini memiliki tujuan agar mencari dan menampung data – data yang didapatkan pada penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang penting dalam menggunakan suatu metode penelitian untuk mencari sumber data yang mendukung penelitian dan mengetahui ilmu – ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti ambil. Yang kemudian di buat kesimpulannya.

2. Studi Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan di lapangan, dengan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung mengenai gejala dan permasalahan yang terjadi dilapangan. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan yang akurat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara bertanya langung kepada responden yang akan kita wawacarai. Responden dalam peneltian ini yaitu kepala desa dan perangkat desa Sayang Kecamatan Jatinangor.

Wawancara yang peneliti lakukan bertujuan untuk mengetahui data dan fakta yang terjadi dilapangan dari informan secara mendalam. Penelitin ini menggunakan wawancara tidak terstruktur karena peneliti mengumpulkan data berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada pihak yang bersangkutan dengan membawa alat wawancara seperti: buku catatan, alat perekam suara dan sebuah handphone.

JURNAL AGREGASI
Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi
Volume 7– Nomor 1, Mei 2019
DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1697
Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan melakukan pengumpulan data dan mencatat suatu hal yang penting, berupa catatan tertulis, dan hal-hal yang dianggap penting ketika melakukan penelitian di lapangan.

Teknik Analisis Data

Hasil pengumpulan data yang sudah terkumpul kemudian di kelompokan berdasarkan jenisnya. Analisis data dilakukan berdasarkan temuan data pada saat observasi. Kemudian hasil dari analisis tersebut disimpulkan. sehingga peneliti dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan fenomena yang terjadi dalam penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti, sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Tahap reduksi data dilakukan untuk memilih data yang di anggap benar dan sesuai dengan penelitian yang di ambil, menggolongkan data yang di peroleh peneliti pada saat melakukan observasi

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Data display atau penyajian data dilakukan peneliti dengan melihat data yang sudah ada, hasil dari observasi, wawancara dan studi pustaka yang di lakukan oleh peneliti.

Tahap selanjutnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data dan informasi yag telah di peroleh.

3. *Conclution Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Tahap selanjutnya yang peneliti lakukan adalah menarik kesimpulan dari data yang sudah terkumpul melalui observasi lapangan untuk menjawab permasalahan yang peneliti ambil mengenai Implementasi Kebijakan Pelaksanaan *e-Government* Pada Desa Sayang Kabupaten Sumedang dalam memberikan pelayanaan yang baik kepada masyarakat. Selain itu peneliti melakukan tinjauan kembali untuk memperoleh kesimpulan dan pemahaman yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut hasil kajian dari Harvard JFK School of Government, untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, terdapat tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh, yaitu *support*, *capacity* dan *value*. *Support* merupakan elemen pertama dan yang paling krusial yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, yaitu keinginan dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan *e-government*. Hasil temuan di lapangan menunjukkan empat aspek yang me njadi kunci sukses pengembangan e-government.

A. Implementasi kebijakan pelaksanaan *e-Government*

JURNAL AGREGASI
Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi
Volume 7– Nomor 1, Mei 2019
DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1697
Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi

Penerapan kebijakan *e-Government* di Desa sayang belum sukses dilaksanakan terlihat dari belum adanya situs web yang dimiliki desa tersebut serta kemampuan perangkat desanya yang kurang mampu dalam menerapkan kebijkana *e-Government*. Penerapan *e-Government* di desa tersebut dimulai sejak tahun 2004 dengan memiliki satu perangkat komputer. Penyediaan infrastruktur di desa tersebut mulai mengalami peningkatan pada tahun 2012 dengan pengadaan komputer di setiap meja perangkat desa, printer hingga sekarang tercatat hanya dua buah, penyediaan wifi dan perangkat elektronik lainnya.

B. Penilaian Penerapan Indikator *e-Government*

Adapun yang menjadi indikator atas nilai-nilai dasar dalam menentukan sukses dan tidaknya penerapan yang akan dan harus dicapai dalam penyelenggaraan *e-Government* ada 4 yaitu efektifitas, efisiensi, transfaransi dan akuntabilitas Azkiya dalam (Saingura, Hayati & Purnomo, Eko Priyo, 2018). adapun pencapaian yang sesuai dengan 4 indikator diatas oleh Desa Sayang dalam pengimplementasian kebijakan pelaksanaan *e-Government* untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* sebagai suatu landasan dan pedoman dalam pelaksanaan dan pemberian pelayanan umum untuk masyarakat berdasarkan pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi Data, B & Dan dalam (Saingura, Hayati & Purnomo, Eko Priyo, 2018)

1. Efektifitas

Efektifitas adalah pengukuran untuk mengetahui capaian sejauh mana yang dikeluarkan untuk mendapatkan sasaran yang telah disepakati yang dimana efektif berarti berpengaruh atau berakibat dalam pelaksanaan untuk pencapaian sasaran dengan cara yang optimal (Bungkaes, 2013).

Adapun pencapaian terhadap nilai indikator efektifitas penerapan *e-Government* di Pemerintahan Desa Sayang adalah penyediaan sarana dan prasarana oprasional yang mendukung untuk terjalannya pengelolaan pemerintah yang baik. Sarana dan prasarana di Desa Sayang sudah menunjang dalam pemberian pelayanan namun belum optimal dilihat secara langsung, para perangkat desa belum mampu memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dengan maksimal dan jika dilihat oleh masyarakat secara luas belum tersedianya website dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan pengukuran atau perkiraan pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan pada sektor pembangunan dalam segala sektor pemerintahan yang pengguna utamanya adalah untuk memenuhi dan menutupi segala yang dibutuhkan oleh

JURNAL AGREGASI
Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi
Volume 7– Nomor 1, Mei 2019
DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1697
Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi

masyarakat, Sudiro dalam (Saingura, Hayati & Purnomo, Eko Priyo, 2018)

Efisiensi mengandung makna yaitu penerapan *e-Government* adalah bertujuan untuk pengelolaan dan penyelnggaraan pemerintahan dengan signifikan pada kecepatan, ketepatan dan kesederhanaan layanan publik (Kurnia, Rauta & Siswanto, 2017). Keuntungan-keuntungan dari pelaksanaan dan penerapan *e-Government* adalah meningkatnya kualitas pelayanan untuk masyarakat Desa Sayang, tanpa membebani sektor pemerintahan dengan biaya yang besar bagi pemerintahan karena efisiensinya pengelolaan yang di dapat sehingga berdampak pada pertumbuhan rasa percaya masyarakat. untuk penerapan teknologi komunikasi dan informasi pada pemerintahan Desa sayang belum berjalan dengan baik, masih terkendala dengan kemampuan perangkat desanya yang belum menguasai teknologi komunikasi dan informasi dengan maksimal. hal ini dikarenakan perangkat desa pada masa pemerintahan kepala desa yang baru perangkat desa 50% diperbaharui sehingga berdampak pada penerapan *e-Government* di desa sayang.

3. Transfaransi

Transfaransi adalah suatu cara yang bisa mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pengetahuan dan informasi yang akurat, cepat, *uptodate,* dan terpercaya dalam hal yang mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan pemerintahan atau sebagainya melalui media-media yang telah disediakan oleh pemerintahan tersebut (Amrih, Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018).

Adapun penilaian indikator transfaransi pada Desa Sayang adalah belum adanya website sebagai pemberian informasi mengenai kinerja, program kerja, perkembangan desa, anggaran dan berita-berita mengenai desa tersebut. Hal ini menjadi sorotan karena penerapan *e-Government* sudah dimulai sejak 2003 namun hingga saat ini Desa sayang belum memiliki situs website dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas. Perangkat desa hanya mengetahui penggunaan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun secara teori dan tujuan perangkat desa belum mengetahui secara jelas tentang pelaksanaan dan penerapan *e-Government.*

Perangkat desa memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dalam memahami penerapan *e-Government* untuk menjadikan Desa Sayang sebagai pemerintahan yang lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.

4. Akuntabilitas

Akuntablitas merupakan cara utama untuk membentuk tata kellola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang transparansi dalam semua aspek pemerintahannya karena akuntabilitas adalah sarana untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan di Indonesia, fatah, rigel nurul dalam ((Saingura, Hayati & Purnomo, Eko Priyo, 2018).

JURNAL AGREGASI
Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi
Volume 7– Nomor 1, Mei 2019
DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1697
Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi

Akuntabilitas sangat erat hubungannya terhadap nilai indikator transparansi karena jika pemerintahan telah melaksanakan pertanggung jawaban dengan didukung sistem media yang menyediakan website-website untuk melampirkan akuntabilita tersebut maka pemerintahan tersebut bisa dikatakan transparan dan terbuka untuk informasi tata kelolanya.

Desa sayang belum adanya website sehingga pemerintahan desanya belum transparan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pertanggung jawaban desa tersebut. Masyarakat yang ingin mengetahui segala informasi mengenai desa tersebut harus datang langsung ke kantor desa untuk meminta informasi mengenai desa tersebut. Hal ini membuat masyarakat harus mendatangi kantor desa untuk meminta data dan pertanggung jawaban kepala desa dengan dilampirkannya bukti fisik tidak secara elektronik yang memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi mengenai desa tersebut.

C. Landasan penerapan E-Government

Implementasi E-government di Indonesia di landasi oleh dasar-dasar hukum yaitu

1. Undang-undang 1945 pasal 28F yang berbunyi setiap orang mempunyai hak untuk saling berkomunikasi, menyimpan, mengolah, menyampaikan dan mudah dalah mengakses informasi serta mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya menggunakan segala jenis alat atau sarana yang tesedia (NegaraRI., 1945) 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2003 tentang Kebikajan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government sebagai suatu landasan dan pedoman dalam pelaksanaan dalam pemberian pelayanan umum untuk masyarakat berdasarkan pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang ada (Data & Dan, 2006). 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menekan pada pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyelenggarakan Transaksi berdasarkan dengan kebebasan, kepastian dan netral teknologi (UU ITE RI, 2008). 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik untuk penjaminan hak kebebasan warga 9egara dalam mengakses atau mendapatkan informasi yang butuhkan secara terjamin kebenarannya (UU KIP RI, 2008).

D. Faktor-faktor Penghambat dan Penentu Keberhasilan Penerapan *E-Government*

Menurut Retnowati (2008) faktor – faktor penentu keberhasilan penerapan egovernment adalah: (1) Kebutuhan seperti apa yang saat ini menjadi prioritas utama dari masyarakat di negara atau di daerah terkait, (2) Infrastruktur telekomunikasi, (3) Tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh pemerintah, (4) Kesiapan SDM di

JURNAL AGREGASI
Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi
Volume 7– Nomor 1, Mei 2019
DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1697
Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi

pemerintah, (5) Ketersediaan dana dan anggaran, (5) Ketersediaan perangkat hukum, (6) Perubahan paradigma cara kerja dan perilaku SDM aparatur.

Faktor-faktor tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengimplementasian *E-Governement* berhasil atau terhambatnya dapat di identofokasi dari faktor-faktor tersebut.

Melihat kesiapan SDM di Desa Sayang masih belum terlihat maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan *e-government*. Peangkat desa hanya mengetahui hal-hal dasar dalam penggunaan komputer. Di desa tersebut belum ada tenaga ahli yang mampu menangani masalah IT. Melihat kondisi pada saat penelitian kemampuan SDM masih kurang diharakan karena keterbatasan pengalaman dan skill yang dimiliki sehingga penggunaan perangkat komputer sama seperti halnya perkantoran. Hanya memindahkan data yang tadinya konvensional di konversikan ke komputerisasi.

Untuk mengembangkan e-government ada empat fase yang diusulkan oleh World Bank (2002), yakni Presence (kehadiran), Interaction (interaksi), Transaction (transaksi) dan Transformation (transformasi). Model yang sama dikemukakan oleh Gartner Research (Gupta, 2004), mengajukan model *The Value Chain of E-Service*, yang menetapkan empat tahap yang secara khusus dikembangkan dalam konteks egovernance. Keempat fase pengembangan tersebut jika dikontekskan untuk pengembangan situs web e-government di Indonesia, meliputi: (1) Kehadiran, yaitu memunculkan situs web daerah di internet. Dalam tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam situs web pemerintah; (2) Interaksi, yaitu web daerah yang menyediakan fasilitas interaksi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam tahap ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi seperti fasilitas download dan komunikasi email dalam situs web pemerintah; (3) Transaksi, yaitu web pemerintah daerah yang selain

memiliki fasilitas interaksi juga dilengkapi fasilitas transaksi pelayanan publik dari pemerintah; (4) Transformasi, yaitu dalam hal ini pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi (Gupta, 2004).

E. Tantangan E-government

Pemanfaatan *e-government* di Indonesia terus di kembangkan. Hal ini membuktikan bahwa masa depan layanan *e-government* sangatlah terang tetapi tetap memiliki beberapa tantangan, diantaranya:

a. Pengembangan Infrastruktur yang merata Dengan kondisi geografis di Indonesia yang memiliki banyak pulau dan daerah terpencil, pemerintah perlu meningkatkan pemerataan infrastuktur baik TIK, internet maupun aliran listrik di seluruh pelosok Indonesia.

b. Terdapatnya dukungan dari lembaga perwakilan rakyat Meski

JURNAL AGREGASI
Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi
Volume 7– Nomor 1, Mei 2019
DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1697
Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi

sebagai perwakilan rakyat, kenyataannya DPR cenderung sering tarik ulur dan mempersulit dalam pengesahan Undang-Undang mengenai pengembangan *e-government* di Indonesia. Padahal yang kita tahu bahwa dukungan dari lembaga seperti DPR sangat dibutuhkan dalam tercapainya kesuksesan egovernment di Indonesia.

c. Tercapainya keberhasilan dalam penerapan e-government Dari segi ekonomi, pengembangan e-government di suatu negara termasuk Indonesia membutuhkan materi yang tidak sedikit. Oleh karenanya, materi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah harus dapat memberikan manfaat sesuai yang diharapkan.

d. Pemberian penghargaan dan fasilitas yang memadai bagi para ahli Indonesia memiliki banyak SDM yang ahli dalam bidang teknologi, namun kebanyakan menetap di luar negeri. Oleh karenanya, pemerintah perlu lebih menghargai dan memberikan fasilitas bagi para ahli, guna meningkatkan perkembangan e-government di Indonesia. Selain itu memberikan pelatihan pembelajaran dan sosialisasi mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi dan egovernment bagi SDM yang ada di Indonesia.

e. Peningkatan kultur berbagi (sharing) di Indonesia Kultur berbagi (sharing) informasi pada masyarakat di Indonesia masihlah kurang, untuk meningkatkannya dibutuhkan peran pemerintah dalam mensosialisasikan situs website pemerintah kepada masyarakat yang berfungsi sebagai sarana sharing guna meningkatkan feedback antara pemerintah dengan masyarakat.

f. Terwujudnya rasa aman dalam pemanfaatan internet Banyak masyarakat yang merasa pemanfaatan layanan secara elektronik kurang aman dan nyaman, untuk itu sebaiknya pemerintah terus memberikan sistem operasi internet dan layanan elektronik yang dijamin keamanannya dan tidak melanggar hak privasi pengguna (Sari & Winarno, 2012).

Mau tidak mau dalam pembangunan *electronic government* harus mengutamakan kesiapan sumberdaya manusia sebagai faktor awal sebagaimana yang evolusi electronic government yang dikembangkan pemerintah Canada. Penerapannya di Indonesia dapat usahakan dengan cara: Peningkatan peran kampus sebagai sarang intelektual dalam pembangunan e-government. Kampus merupakan tempat yang sering digunakan sebagai partner bagi pemerintah dalam merumuskan dan menjalankan program-program pembangunan. Maka dalam

JURNAL AGREGASI
Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi
Volume 7– Nomor 1, Mei 2019
DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1697
Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi

pengembangan electronic government pemerintah harus menjadikan aktor-aktor intelektual (kebanyakan berangkat dari kampus) sebagai partner dalam usaha ini, pelatihan/ workshop aparatur. Dalam implementasi electronic government mutlak dibutuhkan brainware yang dapat mengoperasikan infrastruktur, aparat pemerintah dituntut untuk bisa mengoperasionalkan infrastruktur dalam rangka untuk melayani masyarakat, membudayakan Knowledge Society, pemberdayaan warga negara yang berkompeten dalam teknologi informasi untuk mengantisipasi maraknya hiker dalam kanal akses. Tidak dapat disangkal bahwa dalam dunia maya banyak terjadi hiker yang merugikan baik bagi users maupun supplier. Dalam hal ini dibutuhkan pemberdayaan warga negara yang berkompeten dalam teknologi informasi untuk mengantisipasi maraknya hiker (Pratama. 2005)

Perubahan Paradigma Manajemen E-Government Orientasi dari perubahan paradigma birokrat adalah menghasilkan produk atau pelayanan yang cost-efficient kepada masyarakat dan mereka yang berkepentingan (stakeholders). Orientasinya pada efisiensi karena bukan merupakan rahasia umum bahwa biaya pemerintahan diambil langsung dari anggaran belanja negara/daerah yang terkadang sangat kecil dibandingkan volume dan frekuensi produk/pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Karena selalu menggunakan ukuran biaya sebagai fokus, maka dapat dimaklumi jika banyak sekali produk atau pelayanan yang diberikan kalangan birokrat terkadang memiliki kualitas yang rendah dan cenderung terkesan asal-asalan Pratama. 2005). Didalam e-government pemberian produk dan pelayanan harus berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer satisfaction oriented)*. Ukuran keberhasilan pemberian produk dan pelayanan dari pihak pemerintah kepada masyarakat adalah jumlah keluhan (complaint) dari pelanggan yang bersangkutan terhadap kualitas produk dan pelayanan yang diberikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penerapan kebijakan *e-Government* di Desa Sayang masih belum optimal dalam penggunaan teknologi komunikasi dan informasi. Karena perangkat desanya masih belum mengetahui konsep *e-Government* sebagai tata kelola pemerintahan yang baik, perangkat desa hanya mengetahui penggunaan teknologi komputer dalam memberikan pelayanan namun secara konsep belum mengetahui secara mendalam tentang *e-Government.* Pemerintahan Desa sayang belum efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemerintahan berbasis *e-Government.* Pemerintahan Desa sayang belum mampu mengadakan situs website sebagai sarana memberikan informasi kepada instansi, organisasi dan masyarakat dikarenakan keterbatasan pengetahuan perangkat

DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1697
Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi

desanya, akibat dari pergantian kepala desa dan setengah perangkat desa.

Cepat lambatnya evolusi sebuah pemerintahan dari *knowledge society* menuju *e-government* sangat tergantung dari seberapa peka pemerintah dan masyarakatnya dalam membaca tandatanda zaman (tren atau kecenderungan). Dukungan penerapan e-government dalam pelayanan publik sudah diberikan Pemkab Sleman meski belum optimal, hal ini karena belum ada payung hukum yang mengatur secara khusus di samping alokasi anggaran yang berbeda-beda di setiap OPD.

Saran

Kepala desa harus mampu meningkatkan kemampuan para perangakat desa dalam menerapkan *e-Government* dan bagi mahasiswa dapat mengamalkan ilmunya untuk pengembangan desa tersebut untuk lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Indrajit, Richardus Eko.(2004). *E-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital.* Yogyakarta:Andi Offset.

Jurnal

Amrih Rahayuningtyas, D. P., & Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh Kelola dan EGovernment terhadap Korupsi. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 1(4), 431

Bungkaes, H. R. (2013). Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepualauan Talaud Journal " ACTA DIURNA " Edisi April 2013, (April), 1–23.

Data, B., & Dan, P. (2006). Basis data peraturan dan perundang -undangan. Program, 1–14.

Edwi, A. S. (2008). Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Daerah Di Indonesia : Prespektif Content dan Manajemen. Seminar Nasional Informatika 2008 (SemnasIF 2008), 2008(November 2007), 88-98.

Forman, M. (2005). Using IT to Transform the Effectiveness and Efficiency of Government.Journal e-Government and Information Technology, Pg. 27.

Gupta, M.P. (2004). Toward EGovernment: Management Chalenges, New Delhi, McGraw Hill Publishing Company.

Nurcahyati Dewi & Retnowati Daru. 2008. Peranan e-government dalam rangka mewujudkan Good governance bagi masyarakat. Seminar Nasional Informatika. Yogyakarta

Kase, J. (2010). Perencanaan Strategis Sistem Informasi (SI) Pada Pemerintah Kabupaten Timor

Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi
Volume 7– Nomor 1, Mei 2019

DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1697
Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi

Tengah Selatan. Tesis, Universitas Gadjah Mada.

Kurnia, T. S., Rauta, U., & Siswanto, A. (2017). *E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum*, 46(2), 170–181

Priyanti, Evi.(2017).Pelayanan Publik Berbasis E-Government Di Kabupaten Sumedang (Studi Kasus PadaUnit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Pratama, Arief Budi.2005. Penyelenggaraan *E-Government* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Globalisasi. Dialogue Undip

Saingura, Hayati & Purnomo, Eko Priyo. (2018). Implementasi E-Government Pada Pemerintah Daerah Bantul Yogyakarta. ReaserchGate.

Sari, Kusuma D A & Wahyu Agus Winarno.2012. Implemetasi E-Governement System Dalam Upaya Peningkatan *Clean and Good Governance* di Indonesia. JEAM Vol XI No. 1

Susartono. 2006. E-Government di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Publik UNS, Volume 2 No.1 April 2006.

Sosiawan, Edwi Arief. 2004. Tantangan dan Hambatan Implementasi E-government di Indonesia. http://edwi.dosen.upnyk.ac.id/Ta ntangan%20egov.pdf [4 Juli 2019]

Www.hukumonline.com. (2004), 1–2.

Perundang-undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan Dan Pendayagunaan Telematika Di Indonesia

World Bank. (2002). New Economy Sector Study, Electronic Government and Governance: Lesson for Argentina.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

UU ITE RI. (2008). Uu-2008-11 Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang, 11, 1–18. Retrieved from papers3://publication/uuid/8C845E4E-CD67-4476-BB4F7123C56F0449

UU KIP RI. (2008). uu 14 th 2008, 282.